

CITIZEN POWER DAN FENOMENA KORUPSI DI DAERAH

Dr. Tri Sulistyaningsih, M. Si.

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UMM

Hp.08125257865

Email: sulis226@gmail.com

LATAR BELAKANG

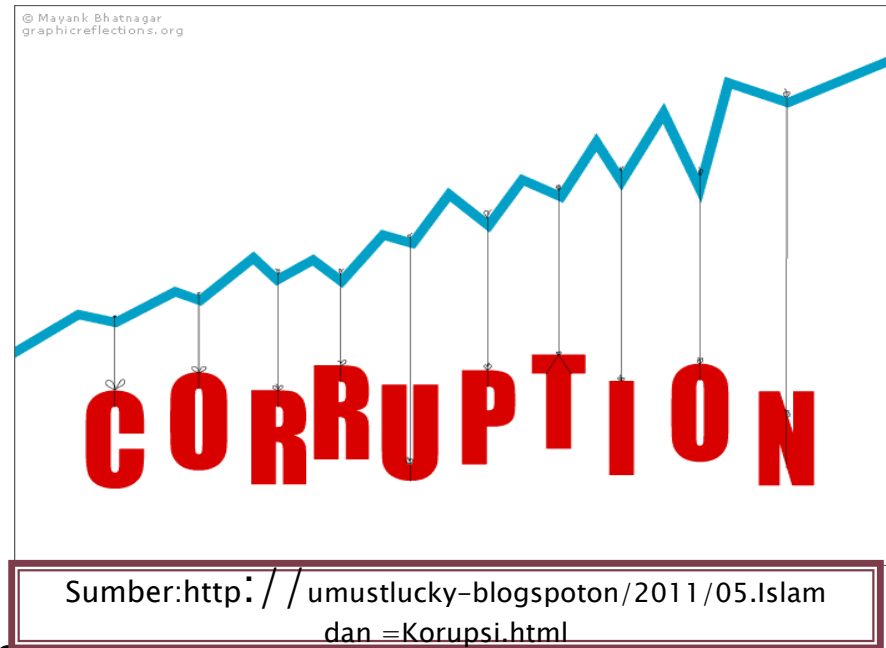
- ▶ Masalah besar dalam penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan di Indonesia adalah **KORUPSI** baik di Pusat maupun Daerah.
- ▶ **KORUPSI** telah menggurita secara sistemik
- ▶ **KORUPSI** di Daerah: Eksees Negatif Otonomi Daerah.



Sumber: <http://Indonews.org/mahasiswa-udayana-adakan-sekolah-anti-korupsi>

- ▶ **INDONESIA:**

Terkorup	Nomor
1997	7
1998	6
1999	3
2000	5
2001	4



- ▶ Menurut survei terbaru badan Transparency International (TI), Indonesia hanya turun satu peringkat negara terkorup, yaitu dari posisi 111 pada tahun kemarin menjadi 110 tahun ini (2011).

Sentralisasi ke Desentralisasi

- ▶ Perubahan Sentralisasi ke Desentralisasi membawa konsekuensi tersendiri.



- ▶ Design Manajemen Transisi
(Pengalihan kewenangan pemerintah pusat yang dominan, perangkat peraturan yg belum sinergi dg daerah, kecuali pemisahan adm pol dan fiskal)

Peluang dan modus operandi korupsi pemerintahan di tingkat lokal. Desentralisasi

- ▶ membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat – daerah dan antar lembaga di daerah.
- ▶ Berbagai perubahan membuka peluang maraknya '*money politics*' oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif,
- ▶ pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta – yang paling umum, adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri.
- ▶ Peluang korupsi semakin terbuka dengan adanya perbedaan/inkonsistensi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, 'kerjasama' antara legislatif dan eksekutif serta minimnya porsi partisipasi dan pengawasan publik. (Rinaldi, Taufik, dkk., 2007)

POSITIF NEGATIF OTODA

Pemberian Otonomi Daerah

Flexibilitas tinggi bagi daerah untuk assessment dalam perencanaan dan implementasi program.

Peluang terjadinya tindak korupsi

POSISI DPRD

DPRD sebagai:
1. Penyelenggara pemerintahan
2. Pengontrol Pemerintahan



Terjebak pada negosiasi kepentingan politik



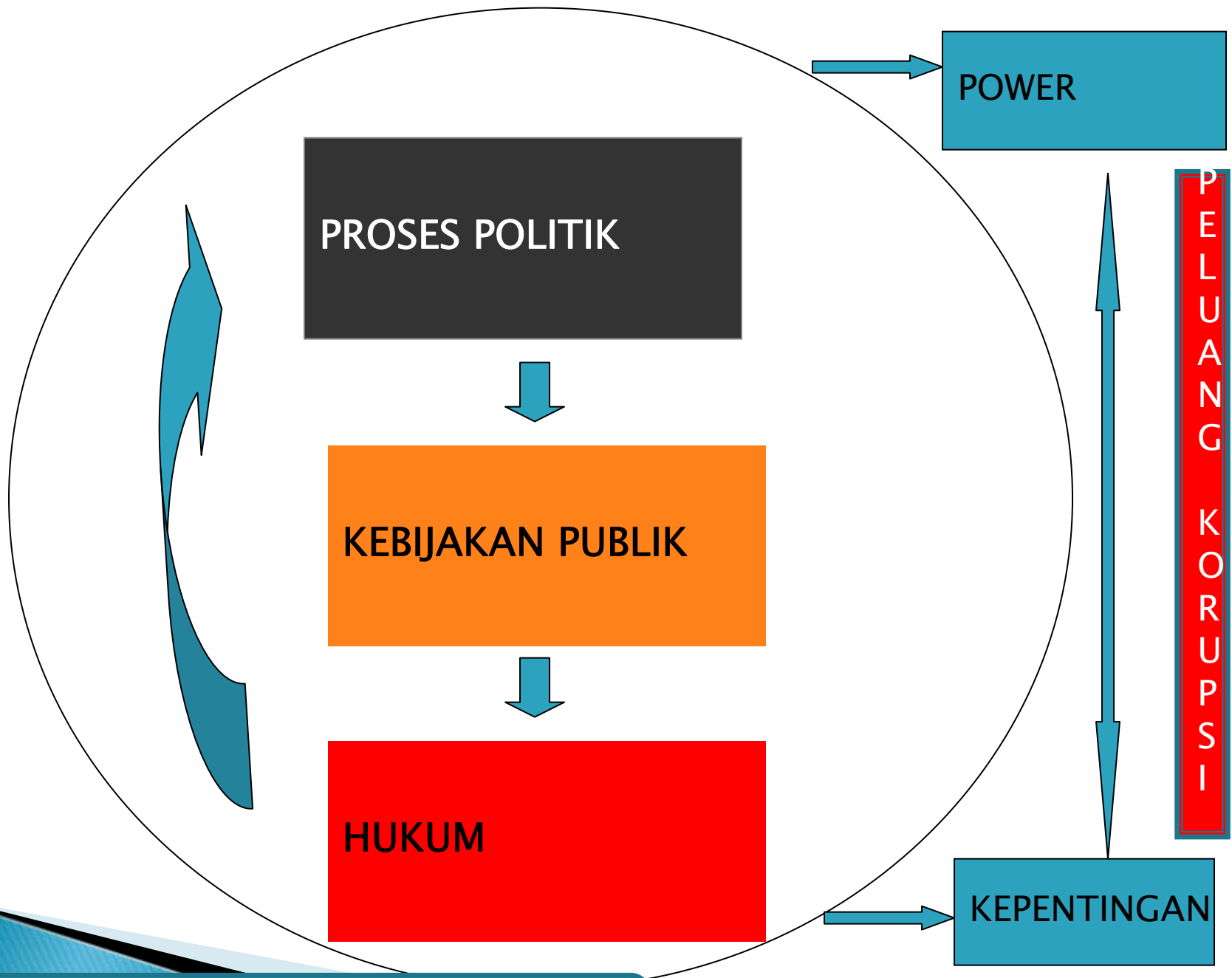
Termarjinalkan hak warga kab/kota

- ▶ Desentralisasi Politik tanpa Control akan salah sasaran.
- ▶ Supremasi kekuasaan birokrasi:
tak terkontrol politisi
tak terkontrol rakyat



- ▶ cenderung korup

Bureaucratic Polity / Bureaucratic
Authoritarianism




Faktor Penyebab Korupsi (C)

Adanya monopoli (M), ditambah adanya diskresi pejabat berwenang (D), dikuramngi akuntabilitas (A) (Klitgaard)

Secara garis besar korupsi dikarenakan


1. Perilaku manusia
2. Sistem

KATEGORI KORUPSI

- ▶ **Ekonomi:** Salah dalam manajemen negara, penyelenggara negara memperkaya diri sendiri
 - ▶ **Budaya:** Seperti tradisi memberi suap dan hadiah (terdapat perbedaan penafsiran)
 - ▶ **Politik:** Perilaku korup para aktor dalam menjalin hubungan negara dengan swasta.
- 


Korupsi Daerah Versi KPK

Modus DPRD


- * Memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan
 - * Menyalurkan Dana APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif
 - * Memanipulasi perjalanan dinas
 - * Menerima gratifikasi
 - * Menerima Suap.
- 

▶ Modus Pejabat Daerah

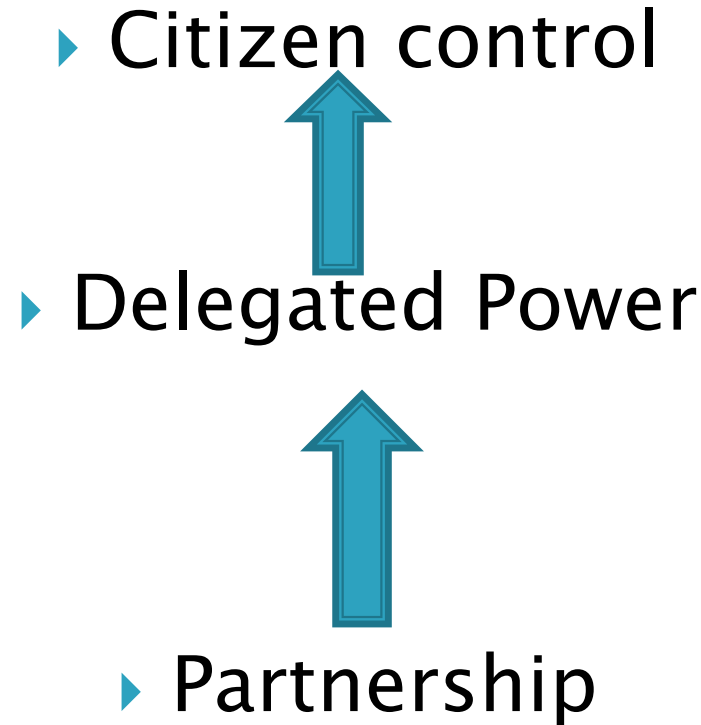
- ▶
 - * Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang.
 - * Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan & tanpa prosedur
 - * Penyimpangan prosedur pengajuan & pencairan dana kas daerah
 - * Manipulasi sisa APBD
 - * Manipulasi dalam proses pengadaan/perijinan/konsensi hutan
 - * Gratifikasi dari BPD penampung dana daerah
 - * Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya
 - * Menggunakan APBD untuk keperluan keluarganya dan koleganya
 - * Menerbitkan Peraturan Daerah untuk upah pungut pajak;
 - * Ruislag/tukar guling tanah dengan mark down harga
 - * Penerimaan Fee Bank

- ▶ **Korupsi Daerah Versi BPK**
 - ▶ – Penggelembungan dana program
 - ▶ – Program fiktif
 - ▶ – Investasi dana daerah ke lembaga keuangan yang tak pruden
- 

Strengthening Local Governance

- ▶ Infra struktur politik belum dapat menjadi penyeimbang supra struktur hanya sebatas PERFORMA demokrasi.
 - ▶ Marjinalisasi rakyat dalam penyusunan kebijakan Daerah.
- 

KENISCAYAAN CITIZEN POWER



▶ Sumber: Arsntein,1971


Tujuan Partisipasi rakyat dalam Anggaran:

:

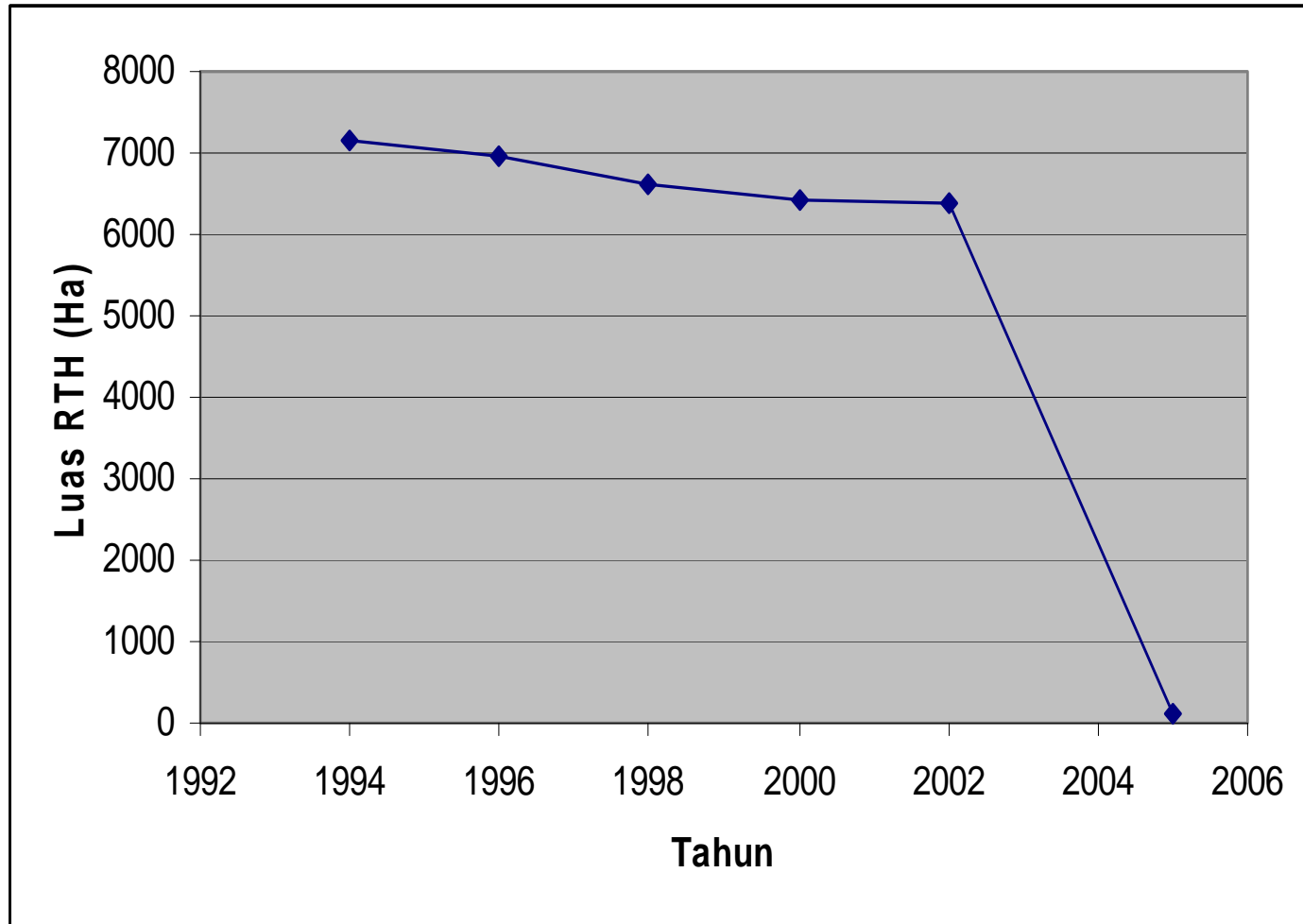
- 1.Mendorong terwujudnya active citizenship.
- 2.Terwujudnya keadilan sosial perbaikan kebijakan publik dan alokasi sumber dana
- 3.Mereformasi administrasi pemerintahan



Contoh Kasus

- ▶ Hasil penelitian MCW, 2006, tentang peran serta warga dalam pengambilan keputusan.
 - ▶ 1. Tahu tentang APBD 37 %
 - ▶ 2. Tidak terlibat dalam penyusunan APBD 95%
- 

Prosentasi Luas RTH dari Luas Wilayah Kota Malang



Sumber: Sugiarto (2006) dan Sigi Bappeko (2005)

Gambar 5.2 Grafik Luas RTH Kota Malang

TERIMA KASIH

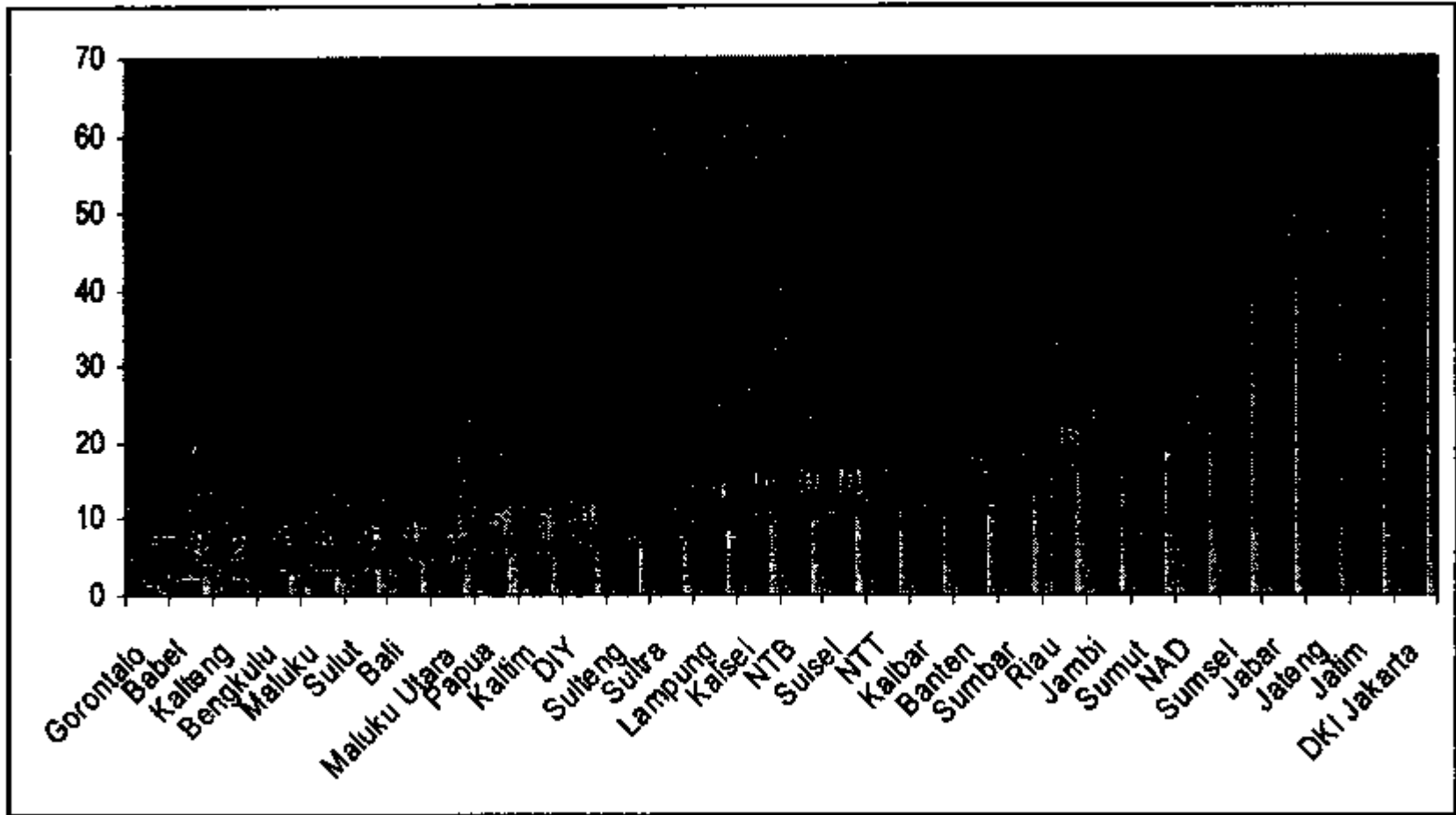


Tabel 1. Tipologi Korupsi

No.	Tipologi	Penjelasan
1.	Korupsi transaktif (<i>transactive</i>)	Praktik korupsi yang dilakukan dalam konteks proses transaksi uang antara pihak-pihak yang terlibat.
2.	Korupsi yang memeras (<i>extortive</i>)	Praktik korupsi yang dipaksakan kepada satu pihak yang biasanya disertai ancaman terhadap kepentingan orang dan hal-hal yang dimilikinya.
3.	Korupsi investif (<i>investive</i>)	Praktik korupsi dalam konteks memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan
4.	Korupsi perkerabatan (<i>nepotistic</i>)	Praktik korupsi yang dilakukan dalam konteks hubungan kekerabatan dan keluarga.
5.	Korupsi defensive (<i>defensive</i>)	Praktik korupsi dalam konteks pihak-pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya.
6.	Korupsi otogenik (<i>autogenic</i>)	Praktik korupsi yang dilakukan oleh seorang diri, tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat di dalamnya.
7.	Korupsi suportif (<i>supportive</i>)	Praktik korupsi dalam konteks dukungan terhadap penciptaan terjadinya korupsi.

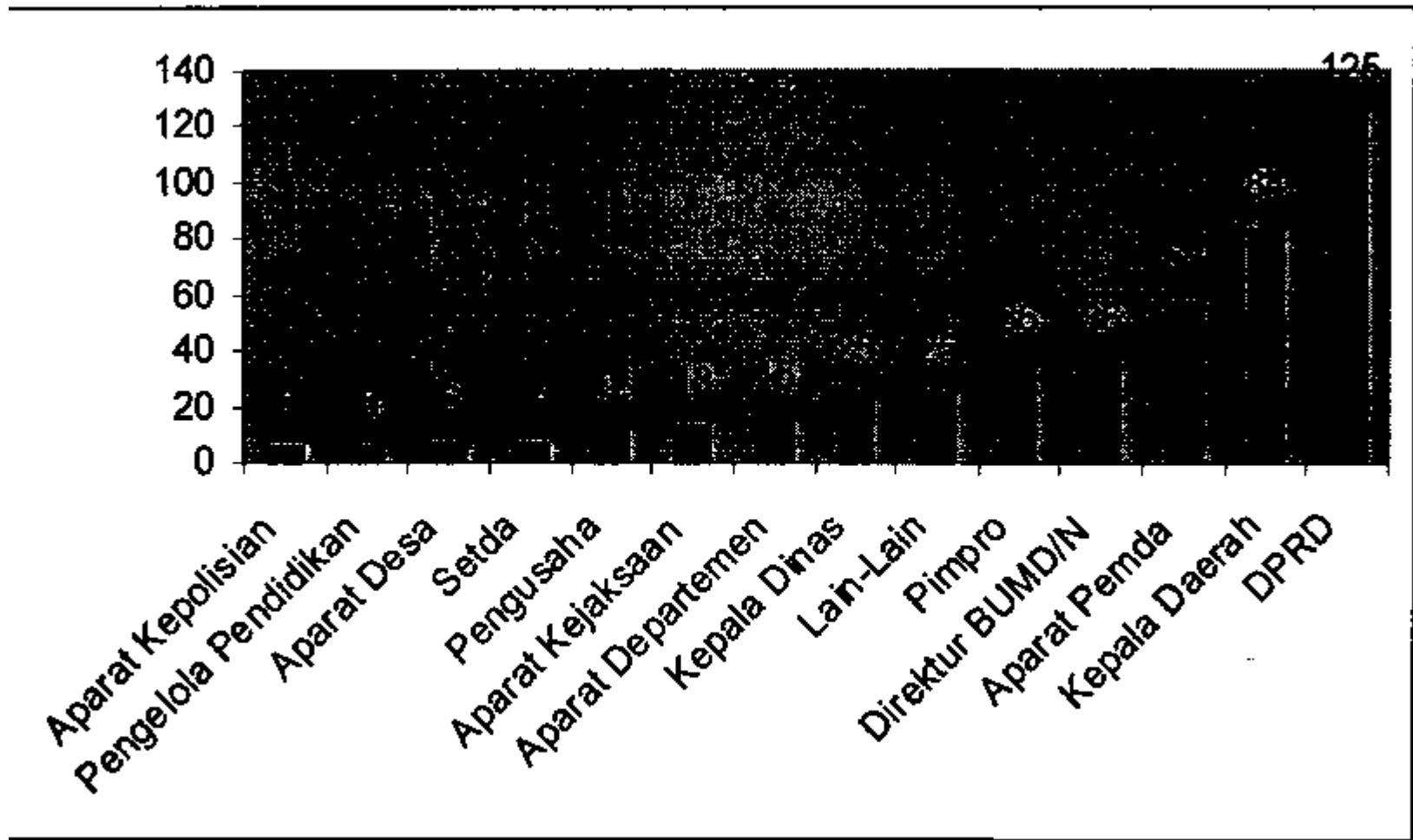
Sumber: Diadaptasi dari Syed Husein Alatas (Diambil dari M Syamsuddin, "Korupsi dalam Perspektif Hukum", Loc.Cit., hlm. 185-186)

KASUS KORUPSI DI DAERAH



Sumber: Otonomi Daerah, Lahan Subur Korupsi, Laporan Akhir Tahun 2004 ICW

Pelaku Tindak Pidana Korupsi



Sumber: Otonomi Daerah, Lahan Subur Korupsi, Laporan Akhir Tahun 2004 ICW